

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat, sehingga terjadi peningkatan baik luas areal maupun produksi kelapa sawit seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pada Tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14.326.350 hektar. Dari luasan tersebut, sebagian besar diusahakan oleh perusahaan besar swasta (PBS) yaitu sebesar 55,09% atau seluas 7.892.706 hektar. Luas areal Kelapa Tahun 2018 mencapai 3.417.951 hektar, dari luasan tersebut sekitar 99% atau seluas 3.385.085 hektar. Perkebunan Rakyat (PR) menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia yaitu seluas 5.818.888 hektar atau 40,62 % sedangkan sebagian kecil diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu 614.756 hektar atau 4,29 % (Direktorat Jendral Perkebunan, 2019).

Areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2020, Provinsi Riau masih menjadi provinsi penghasil kelapa sawit terbesar dengan luas sebesar 2,86 juta hektar atau 19,62 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dari luas areal tersebut, Provinsi Riau menghasilkan 8,54 juta ton CPO. Luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia menurut provinsi tahun 2020 (Katalog BPS, 2020).

Luas areal perkebunan kelapa sawit menurut status pengusahaan pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Seperti tahun sebelumnya, penguasaan luas areal perkebunan kelapa sawit masih didominasi oleh perkebunan besar swasta. Sebesar 7,98 juta hektar atau 54,69 persen perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perkebunan swasta; diikuti perkebunan

rakyat yang menguasai 6,04 juta hektar atau 41,44 persen perkebunan kelapa sawit; serta sisanya 0,57 juta hektar atau 3,87 persen dikuasai oleh perkebunan besar negara (Katalog BPS, 2020).

Kementerian Pertanian menetapkan luas tutupan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 16,381 juta hektare di 26 provinsi di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Menteri Pertanian Bernomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019. Dari 16,3 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia, Riau menempati posisi pertama seluas 3,387 juta hektare atau sekitar 20%. Selanjutnya, Sumatera Utara 2,079 juta hektare atau 12,69%. Kalimantan Barat seluas 1,807 juta hektare.

Produk kelapa sawit yang dipasarkan secara internasional akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam sistem perdagangan internasional, seperti sertifikasi produk yang mensyaratkan produk ramah lingkungan dan ramah sosial. Sertifikasi produk merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk-produk kelapa sawit yang dipasarkan diproduksi dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan. Sertifikasi merupakan serangkaian standar dan kriteria yang harus dipenuhi setiap aktor yang terkait dalam rantai pasok suatu produk yang diperdagangkan, baik di level nasional maupun internasional. Sertifikasi yang terkait dengan produk-produk kelapa sawit antara lain RSPO, *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC), dan *Forest Alliance* (FA). RSPO ialah sertifikat untuk produk-produk minyak sawit yang digunakan untuk produk-produk makanan dan non-makanan yang ditujukan ke pasar Eropa. Sementara itu, ISPO ialah sertifikat yang wajib dimiliki setiap produsen minyak sawit dan produk turunannya yang beroperasi di wilayah Indonesia. Sertifikat ISCC digunakan untuk ekspor minyak sawit yang diekspor ke Eropa untuk produksi biodiesel.

Hal ini menjadi dasar untuk mendapat hasil produksi kelapa sawit yang optimal dengan adanya penerapan *Good Agriculture Practice* yang didasar pada ISPO. *Good Agriculture Practice* bertujuan untuk menciptakan lingkungan produksi kelapa sawit yang terbaik dengan manajemen

pemeliharaan dan pemanenan yang terorganisir dengan menerapkan juga lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan yang diinginkan dalam ISPO, sehingga perusahaan manapun dengan penerapan ini akan mendapatkan hasil yang optimal dan mampu memasarkan CPO dengan mudah karena sudah bersertifikat ISPO.

Pentingnya teknik budidaya tanaman yang tepat terkait dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan produk pertanian yang aman bagi kesehatan dan kebugaran, aman bagi keselamatan dan kesehatan kerja, aman bagi kualitas dan kelestarian lingkungan hidup mendorong dikembangkannya berbagai persyaratan teknis bahwa produk harus dihasilkan dengan teknologi yang akrab lingkungan. Penilaian terhadap aspek keselamatan kerja, kesehatan konsumen dan kualitas lingkungan dilakukan pada keseluruhan proses agribisnis dari hulu sampai hilir (pemasaran). Konsumen mendesak WTO agar perubahan sikap perilaku dan permintaan akan kualitas produk-produk pertanian diintegrasikan dalam kebijakan perdagangan internasional produk-produk pertanian (Fachrudin and Yazid, 2021).

Permintaan dan desakan konsumen kemudian ditampung dan diperhatikan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO). Hal tersebut di ataslah yang juga turut mendorong berbagai negara di belahan dunia untuk menerapkan Praktek Pertanian yang Baik atau Good Agricultural Practices (GAP). Khusus untuk Kelapa Sawit hal ini berkaitan dengan Sistem Pembangunan Perkebunan. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/ Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang salah satu ketentuan standarnya adalah Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengelolaan Kelapa Sawit (Fachrudin and Yazid, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji implementasi *Good Agriculture Practice* terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit baik dari pengelolaan perawatan, pengelolaan kebun, dan juga panen kelapa sawit yang akan dibandingkan dengan hasil pencapaian perusahaan berupa produksi dan produktivitas.

B. Perumusan Masalah

Aspek budidaya yang standar pada perkebunan kelapa sawit pada saat ini masih belum semua setara dengan adanya penerapan praktik budidaya terbaik. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan GAP dan perkebunan yang berkelanjutan. Sering dijumpai kendala-kendala dan masalah yang ditimbulkan dari perkebunan kelapa sawit baik lingkungan alam maupun dampak residu terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi dan untuk meningkatkan pendapatan negara dari perkebunan kelapa sawit melalui sertifikasi ISPO, ISO, dan GAP. Namun semua ini masih belum maksimal penerapannya, karena para pihak terkait masih belum bisa fokus dalam pengawasan penerapan perkebunan yang berkelanjutan. Umumnya untuk mencapai penerapan GAP yang benar dan diterapkan dengan ditunjukkan dari hasil produksi dan produktivitas perlu memperhatikan faktor-faktor pembatas utama. Faktor yang paling penting adalah faktor dinamis yaitu, pemeliharaan meliputi pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit, pembuatan kebijakan pengelolaan perkebunan (SOP), pengawasan produksi dan produktivitas.

Dari uraian tersebut diatas, penelitian membuat perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit memberikan pengaruh terhadap pencapaian produktivitas kegiatan pemeliharaan dan pengendalian OPT kelapa sawit yang bisa mempengaruhi fluktuasi produksi.
- b. Implementasi GAP yang sudah diterapkan perusahaan dan sudah sama dengan prinsip ISPO, apakah memberikan kenaikan produksi yang sesuai dengan Yield profil dan Yield making.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pencapaian implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit dengan tercapainya produktivitas pemeliharaan

dan pengendalian OPT tanpa residu bahan kimia kontak.

- b. Untuk mengetahui pencapaian implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit dengan tercapainya Yield Making terhadap Yield Taking.

D. Manfaat Penelitian

- a. Mengkaji implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan sudah terdokumentasi oleh perusahaan.
- b. Menjadi acuan perbaikan perusahaan mengenai pencapaian implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit dalam bidang pemeliharaan dan pengendalian OPT.
- c. Menjadi pegangan perusahaan untuk kajian lanjutan dan dapat membantu sebagai tolak ukur pencapaian perusahaan mengenai implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yaitu:

1. Data yang diambil adalah data primer dari hasil survey staff agronomi mengenai GAP dan data sekunder kebun.
2. Variabel yang akan dikaji adalah penerapan GAP di bidang pemeliharaan pemupukan, penyemprotan, pengendalian OPT dan produksi serta produktivitas.
3. Semua variable akan dibandingkan dengan produksi dan produktivitas aktual dan juga penerapan kebijakan perusahaan (SOP/Standart Oprasional Prosedur)
4. Mengidentifikasi GAP mana yang akan timbul atau faktor pembatas apa yang akan timbul dari hasil kajian.
5. GAP yang dikaji ini adalah implementasinya di lapangan yang sesuai atau GAP versi dari ISPO, agar hasil yang dikaji selaras dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan.